

BAB V

PEMBAHASAN

Bab pembahasan diawali dari pemaparan mengenai aksesibilitas wisata yang telah disediakan bagi penyandang disabilitas pada objek-objek wisata di Kota Pangkalpinang. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai intensitas pemanfaatan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas. Terakhir, pembahasan dilanjutkan dengan analisis *subaltern* terkait penyediaan aksesibilitas wisata bagi penyandang tunadaksa di Kota Pangkalpinang.

A. Aksesibilitas Wisata Bagi Penyandang Disabilitas

Secara umum, terdapat beberapa strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka pengembangan kepariwisataan yang dilakukan (RIPPDA Kota Pangkalpinang, 2013: 197-211). Adapun beberapa strategi sebagaimana dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan kewilayahan. Hal ini dilakukan guna mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
2. Strategi pengembangan sosial budaya yang diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai *event-event* kebudayaan.
3. Strategi pengembangan SDM, salah satunya melalui kegiatan sadar wisata.
4. Strategi pengembangan kelembagaan yang berfungsi sebagai penyusunan tata kerja *stakeholder* terkait.

5. Strategi pengembangan koordinasi kelembagaan yang meliputi kewenangan dan pelaku pengembangan wisata.
6. Strategi pengembangan daya tarik kepariwisataan, termasuk di dalamnya kegiatan pelestarian budaya.
7. Strategi pengembangan amenitas yang meliputi pengembangan hotel, pusat oleh-oleh, *restaurant*, dan lain sebagainya.
8. Strategi pengembangan ekonomi pasar melalui pengembangan pasar wisata, investasi, promosi, dan lain sebagainya.

Penyediaan aksesibilitas wisata bagi panyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk penerapan dari strategi pengembangan daya tarik wisata yang dilakukan. Secara umum, aksesibilitas fisik yang harus disediakan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi objek wisata yang telah ditentukan meliputi akses jalan khusus, perabot khusus, ukuran dasar ruang, kamar kecil, dan area parkir. Secara lebih rinci akses jalan khusus meliputi jalur pedestrian, jalur pemandu, tangga, penyeberang pejalan kaki, dan tempat pemberhentian, sedangkan untuk perabot khusus terdiri dari pintu, ramp, wastafel, perlengkapan, dan rambu.

Lebih lanjut, terkait penyediaan aksesibilitas non-fisik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang maupun pengelola wisata terdiri dari pelayanan informasi terkait sarana dan prasarana, serta pelayanan khusus meliputi pembayaran pada loket/kasir, melakukan antrian, menyeberang jalan, naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum, dan keperluan-keperluan lain yang membutuhkan pelayanan khusus. Adapun

penjabaran mengenai aksesibilitas wisata yang telah disediakan bagi penyandang disabilitas tunadaksa pada objek-objek wisata yang telah ditentukan ialah sebagai berikut:

a. Museum Timah Indonesia Pangkalpinang

Objek wisata ini merupakan salah satu objek wisata sejarah yang ada di Kota Pangkalpinang. Awalnya museum ini dikenal dengan sebutan Museum Wisama Budaya, namun pada tanggal 2 Agustus 1997, PT. Timah, Tbk., mengganti sebutan tersebut menjadi Museum Timah Indonesia yang di dalamnya menyimpan sejarah pertambangan di Pulau Bangka (Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pangkalpinang, 2015: 35).

Berdasarkan Perda Provinsi Babel No. 10 Tahun 2010, terdapat 13 jenis aksesibilitas fisik dan 6 jenis aksesibilitas non-fisik yang sesuai dengan kondisi Museum Timah Indonesia Pangkalpinang. Adapun aksesibilitas yang telah disediakan pada objek wisata Museum Timah Indonesia Pangkalpinang sendiri meliputi area parkir kendaraan (gambar 5.1) sampai depan pintu masuk museum. Kemudian, terdapat juga ramp bagi pengguna kursi roda tepat di depan pintu masuk museum dan disalah satu ruangan di dalamnya (gambar 5.2).

Apabila dibandingkan dengan aksesibilitas yang harus disediakan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan perda Babel No. 10 Tahun 2010, maka penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunadaksa yang ada di Museum Timah Indonesia Pangkalpinang ini masih

sangat rendah. Hal ini terlihat dari penyediaan aksesibilitas yang hanya terdiri dari dua jenis saja, yaitu area parkir dan juga ramp sebagai akses masuk ke Museum Timah Indonesia Pangkalpinang.



Gambar 5.1 Area Parkir Museum Timah Indonesia Pangkalpinang
(Sumber: Dok. Pribadi)

Ketika ditemui dan ditanyakan terkait kelanjutan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunadaksa, Bapak Taufik selaku Kepala Museum Timah Indonesia Pangkalpinang, menjelaskan bahwa:

“Pembangunan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya tunadaksa ini belum selesai dilakukan. Sampai saat ini memang hanya ada beberapa akses saja yang sudah selesai dibangun, namun kami selalu berusaha untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menikmati wisata ini. Terkait penyediaan aksesibilitas selanjutnya akan kami jadikan program kerja dalam beberapa tahun kedepan.” (Wawancara 29 April 2019)

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa penyediaan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas tunadaksa pada Museum Timah Indonesia

Pangkalpinang ini masih dalam proses pembangunan. Hal ini kemudian akan terus direalisasikan sebagai bentuk program kerja dalam beberapa tahun kedepan. Penyediaan aksesibilitas wisata ini dilakukan pengelola untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas tunadaksa.



Gambar 5.2 Pintu Masuk Museum Timah Indonesia Pangkalpinang
(Sumber: Dok. Pribadi)

b. Pantai Pasir Padi

Objek wisata ini merupakan salah satu objek wisata yang paling diminati oleh masyarakat Kota Pangkalpinang. Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pangkalpinang, data tiga tahun terakhir menunjukkan intensitas pengunjung yang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 202.802 pengunjung yang datang. Jumlah ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 339.890 pengunjung, dan pada tahun 2017 jumlah pengunjung

mencapai 481.546 orang. Pengunjung sebagaimana dimaksud tidak hanya berasal dari dalam Kota Pangkalpinang, namun juga dari luar Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Riharnadi selaku Kepala Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pangkalpinang terkait aksesibilitas yang telah disediakan bagi penyandang disabilitas tunadaksa tanggal 3 Mei 2019, beliau mengatakan bahwa baru-baru ini telah dibangun jalan pedestrian (gambar 5.3) dan pusat informasi (gambar 5.4) yang disediakan bagi pengguna kursi roda di pantai ini. Beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya ada proyek pembangunan WC umum bagi penyandang disabilitas dan juga masyarakat pada umumnya yang akan dilakukan. Namun, dikarenakan proyek pembangunan tersebut gagal lelang, maka pembangunan aksesibilitas sebagaimana dimaksud untuk sementara ini dibatalkan.

Terkait penyediaan aksesibilitas wisata sesuai dengan Perda Provinsi Babel No. 10 Tahun 2010 sendiri, pengelola wisata Pantai Pasir Padi baru menyediakan satu jenis aksesibilitas fisik berupa jalan pedestrian dan satu jenis aksesibilitas non-fisik berupa pusat informasi. Oleh karenanya, secara umum penyediaan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas tunadaksa pada Pantai Pasir Padi ini masih sangat rendah. Kendati demikian, Bapak Riharnadi dalam wawancara yang telah dilakukan sebelumnya juga menjelaskan bahwa penyediaan aksesibilitas wisata bagi

penyangang disabilitas ini akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perda yang berlaku. Penyediaan aksesibilitas ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap penyangang disabilitas.



Gambar 5.3 Jalan Pedestrian di Pantai Pasir Padi
(Sumber: Dok. Pribadi)



Gambar 5.4 Pusat Informasi di Pantai Pasir Padi
(Sumber: Dok. Pribadi)

c. Tamansari Kota Pangkalpinang

Selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, Tamansari Kota Pangkalpinang juga merupakan objek wisata budaya yang mengandung nilai-nilai edukasi penting bagi masyarakat Kota Pangkalpinang khususnya. Terdapat sebuah tugu yang berada di tengah-tengah Tamansari Kota Pangkalpinang yang dikenal dengan sebutan Tugu Pergerakan Kemerdekaan. Tugu ini dibangun untuk mengenang perjuang rakyat Bangka dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Mengenai aksesibilitas wisata yang telah disediakan bagi penyandang disabilitas tunadaksa di Tamansari Kota Pangkalpinang ini meliputi ramp sebagai akses masuk bagi pengguna kursi roda (gambar 5.5) dan untuk mengakses mini *stage* yang ada di tengah-tengah Tamansari Kota Pangkalpinang (gambar 5.6). Lebih lanjut, penyediaan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas tunadaksa di Tamansari Kota Pangkalpinang ini hanya terdiri dari satu jenis aksesibilitas saja yaitu ramp yang termasuk jenis aksesibilitas fisik. Penyediaan aksesibilitas wisata sebagaimana dimaksud tergolong masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan perda yang berlaku.

Pada saat diwawacarai tanggal 3 Mei 2019, Bapak Riharnadi (Kepala Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat) menyatakan bahwa:

“Kami (Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pangkalpinang) saat ini sedang memfokuskan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam bentuk fisik. Meskipun belum sempurna, namun kami sudah menyediakan paling tidak akses yang paling penting dan harus ada, yaitu jalan (akses masuk) bagi pengguna kursi roda. Mengingat objek wisata di Kota Pangkalpinang ini tidak terlalu ekstrim seperti di tempat-tempat lainnya, jadi penyediaan aksesibilitas ini selanjutnya akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa, saat ini Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga memang baru memfokuskan pengembangan aksesibilitas dalam bentuk fisik saja. Oleh karenanya, di Tamansari Kota Pangkalpinang sendiri, aksesibilitas yang telah disediakan baru berupa penyediaan aksesibilitas fisik yang terdiri dari ramp sebagai akses masuk dan mengakses mini *stage* yang ada di tengah-tengah Tamansari Kota Pangkalpinang.



Gambar 5.5 Akses Masuk Pengguna Kursi Roda di Tamansari
(Sumber: Dok. Pribadi)



Gambar 5.6 *Mini Stage* di Tamansari Kota Pangkalpinang
(Sumber: Dok. Pribadi)

d. Alun-alun Taman Merdeka (ATM) Kota Pangkalpinang

Selain berfungsi sebagai pusat kota, Alun-alun Taman Merdeka (ATM) Kota Pangkalpinang juga berfungsi sebagai pusat kuliner yang seringkali dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun luar Kota Pangkalpinang. Tidak berbeda jauh dengan Tamansari Kota Pangkalpinang, Alun-alun Taman Merdeka (ATM) Kota Pangkalpinang yang letaknya berseberangan dengan Tamansari Kota Pangkalpinang juga memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunadaksa. Terkait aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas di Alun-alun Taman Merdeka (ATM) Kota Pangkalpinang sendiri meliputi ramp sebagai akses masuk penyandang disabilitas tunadaksa ke Alun-alun Taman Merdeka (ATM) Kota Pangkalpinang (gambar 5.7) dan jalan landai di seputaran taman (gambar 5.8). Lebih lanjut, penyediaan aksesibilitas wisata di Alun-

alun Taman Merdeka (ATM) Kota Pangkalpinang juga tergolong sangat rendah apabila dibandingkan dengan penyediaan aksesibilitas sesuai dengan perda yang berlaku.



Gambar 5.7 Akses Masuk ATM bagi Pengguna Kursi Roda
(Sumber: Dok. Pribadi)



Gambar 5.8 Jalan Landai Alun-alun Taman Merdeka Pangkalpinang
(Sumber: Dok. Pribadi)

Saat diwawancarai beberapa waktu lalu, beberapa orang penyandang disabilitas tunadaksa memberikan pendapatnya terkait aksesibilitas di Alun-alun Taman Merdeka (ATM) Kota Pangkalpinang. Bapak Rahmat (wiraswasta) menyatakan bahwa:

“nah kalok yang alun-alun ni ken aku jugak punya kawan yang pakek kursi roda, kan ada akses untuk masuk ke lapangan e tu, itu dikasi palang besi. Jadi untuk korsi roda sulit.” (Wawancara 9 Mei 2019)

(nah kalau yang di alun-alun, saya juga punya teman yang menggunakan kursi roda, akses masuk ke lapangannya di pasang palang besi jadi untuk pengguna kursi roda sulit)

Ketika observasi lapangan, peneliti memang melihat ada palang besi yang dipasang pada setiap pintu masuk Alun-alun Taman Merdeka (ATM) Kota Pangkalpinang, khususnya pada bagian bawah alun-alun (gambar 5.9). Namun, pintu masuk tersebut masih bisa digunakan bagi penyandang disabilitas tunadaksa kategori ringan. Sementara bagi penyandang disabilitas tunadaksa kategori sedang dan parah, dapat menggunakan akses masuk yang sudah disediakan pengelola berupa bidang miring pada bagian atas Alun-alun Taman Merdeka (ATM) Kota Pangkalpinang.

Klarifikasi serupa juga didapat dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pangkalpinang terkait pemasangan palang besi pada pintu masuk ATM Kota Pangkalpinang. Pemasangan palang besi ini dilakukan agar tidak ada kendaraan yang berlalu-lalang di area taman ATM Kota Pangkalpinang. Hal ini juga bertujuan untuk menimbulkan rasa aman bagi pejalan kaki dan juga penyandang disabilitas. Terkait penyediaan

aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas, Alun-alun Taman Merdeka (ATM) Kota Pangkalpinang hanya memiliki dua dari 13 jenis aksesibilitas wisata. Lebih lanjut, untuk aksesibilitas non-fisik sendiri hingga saat ini belum terlihat penyediaanya.



Gambar 5.9 Palang Besi pada Alun-alun Taman Merdeka (ATM)
(Sumber: Dok. Pribadi)

e. Perkuburan Cina Sentosa Kota Pangkalpinang

Perkuburan Cina Sentosa digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Ceng Beng atau ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat Cina setiap tahunnya. Oleh karena perkuburan ini memiliki lahan terbesar se-Asia Tenggara, maka kegiatan Ceng Beng ini ditetapkan sebagai *event* berskala nasional oleh Kementerian Pariwisata Indonesia.

Saat ini, Perkuburan Cina Sentosa dikelola oleh Yayasan Sentosa bersama dengan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pangkalpinang. Namun, saat diberikan pertanyaan mengenai aksesibilitas apa saja yang sudah disediakan bagi penyandang disabilitas tunadaksa,

Bapak Apin (wawancara 3 Mei 2019) selaku pengelola Yayasan Sentosa mengatakan bahwa dari Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang maupun yayasan, belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunadaksa. Oleh karena perkuburan Cina ini memiliki ahli waris dari keluarga masing-masing, maka penyediaan aksesibilitasnya diserahkan kepada ahli waris dari keluarga masing-masing.

Bapak Andi (wawancara 3 Mei 2019), seorang penyandang disabilitas tunadaksa yang beragama Kristen menyatakan bahwa untuk mengakses Perkuburan Cina Sentosa ini cenderung sulit. Terutama bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Hal ini dikarenakan letak perkuburan yang berada pada daerah perbukitan dan hanya disediakan anak tangga untuk mengakses tempat tersebut. Dokumentasi terkait kondisi Perkuburan Cina Sentosa dapat dilihat pada gambar 5.10.



Gambar 5.10. Kondisi Perkuburan Cina Sentosa Pangkalpinang
(Sumber: Dok. Pribadi)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun sudah ditetapkan sebagai perkuburan cina terbesar se-Asia Tenggara, namun belum ada upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunadaksa, baik dari yayasan maupun dari pemerintah daerah Kota Pangkalpinang. Hal ini dikarenakan penyediaan aksesibilitas diserahkan pada ahli waris dari keluarga masing-masing. Secara umum, penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada objek-objek wisata dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.1.

Berdasarkan tabel 5.1, usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang maupun pengelola wisata dalam penyediaan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas tergolong cukup baik. Meskipun pada kenyataannya aksesibilitas yang sudah ada masih sangat minim jumlahnya (hanya terbatas pada akses masuk ke objek wisata saja), namun Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang maupun pengelola wisata sudah mengupayakan penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud untuk menjamin kesempatan berwisata bagi penyandang disabilitas. Penyediaan aksesibilitas wisata ini sendiri disesuaikan dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak (tabel 4.2) yang ada di Kota Pangkalpinang. Oleh karenanya, hingga saat ini, penyediaan aksesibilitas yang dilakukan baru ditujukan bagi penyandang disabilitas tunadaksa saja.

Secara umum, aksesibilitas wisata yang disediakan bagi penyandang disabilitas tunadaksa hanya berupa ramp sebagai akses masuk ke dalam objek wisata. Aksesibilitas ini terdapat di Museum Timah Indonesia

Tabel 5.1. Penyediaan Aksesibilitas pada Objek Wisata

No.	Jenis Aksesibilitas	Objek Wisata				
		Museum Timah Indonesia Pangkalpinang	Pantai Pasir Padi	Tamansari Kota Pangkalpinang	Alun-Alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang	Perkuburan Cina Sentosa
A. Aksesibilitas fisik						
1.	Ukuran dasar ruang	-	-	-	-	-
2.	Kamar kecil	-	-	-	-	-
3.	Area parkir	✓	-	-	-	-
4.	Jalur pedestrian	-	✓	-	-	-
5.	Jalur pemandu	-	-	-	-	-
6.	Tangga	-	-	-	-	-
7.	Penyeberang pejalan kaki	-	-	-	-	-
8.	Tempat pemberhentian	-	-	-	-	-
9.	Pintu	-	-	-	-	-
10.	Ramp	✓	-	✓	✓	-
11.	Wastafel	-	-	-	-	-
12.	Perlengkapan	-	-	-	-	-

Lanjutan Tabel 5.1. Penyediaan Aksesibilitas pada Objek Wisata

13.	Rambu	-	-	-	-	-
B. Aksesibilitas non-fisik						
1.	Pelayanan informasi	-	✓	-	-	-
2.	Pembayaran pada loket/kasir	-	-	-	-	-
3.	Melakukan antrian	-	-	-	-	-
4.	Menyeberang jalan	-	-	-	-	-
5.	Naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum	-	-	-	-	-
6.	Keperluan-keperluan lainnya	-	-	-	-	-

Sumber Data: Olah Data Primer

Pangkalpinang, Tamansari Kota Pangkalpinang, dan Alun-alun Taman Merdeka (ATM) Kota Pangkalpinang. Pada Museum Timah Indonesia Pangkalpinang area parkir juga dibuat landai sehingga bisa dengan mudah diakses oleh penyandang disabilitas tunadaksa.

Penyediaan aksesibilitas yang berbeda dengan objek wisata lainnya terjadi di Pantai Pasir Padi. Pada objek wisata ini, aksesibilitas yang disediakan berupa jalan pedestrian dan pusat informasi yang juga disediakan bagi penyandang disabilitas tunadaksa. Lebih lanjut, pada objek wisata Perkuburan Cina Sentosa belum memiliki aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas tunadaksa. Hal ini dikarenakan penyediaan aksesibilitas diserahkan pada ahli waris dari keluarga masing-masing.

Ketika diberikan pertanyaan terkait aturan dalam penyediaan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang maupun pengelola wisata menyatakan bahwa belum ada aturan secara jelas mengenai kewajiban penyediaan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas, khususnya ditingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, hingga saat ini penyediaan aksesibilitas yang dilakukan masih sangat minim. Penyediaan aksesibilitas yang dilakukan ini hanya berdasarkan inisiatif dari pemerintah dan pengelola wisata saja sebagai bentuk kepedulian terhadap penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, terkait pedoman yang digunakan dalam penyediaannya merujuk pada aturan yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Kendati demikian, baik dari Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang maupun pengelola wisata telah berkomitmen untuk tetap menyediakan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas ini secara bertahap sesuai dengan undang-undang dan perda yang berlaku.

Lebih lanjut, beberapa orang penyandang disabilitas tunadaksa yang telah diwawancarai sebelumnya juga menyampaikan harapan mereka terkait penyediaan aksesibilitas wisata selanjutnya. Bapak Agit (dalam wawancara 18 April 2019) menyampaikan bahwa *“Kalok untuk di tempat wisata ni harus ade toilet umum nah, teros jalan, trotoar, rambu atau pengaman”*, (*Kalau untuk di tempat wisata harus ada toilet umum, jalan, trotoar, rambu atau pengaman*).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Syifa yang merupakan siswi disalah satu sekolah luar biasa di Kota Pangkalpinang. Syifa menyatakan bahwa aksesibilitas penting yang juga harus ada pada objek-objek wisata ialah toilet umum. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas membutuhkan waktu yang tidak sama atau cenderung lebih lama apabila dibandingkan dengan penggunaan toilet oleh masyarakat secara umum. Berdasarkan kedua informasi di atas, penyandang disabilitas tunadaksa khususnya berharap agar Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang maupun pengelola wisata juga menyediakan toilet umum khusus penyandang disabilitas tunadaksa pada penyediaan aksesibilitas wisata selanjutnya.

B. Intensitas Pemanfaatan Aksesibilitas Wisata Bagi Penyandang

Disabilitas

Disadari atau tidak bahwa keberadaan penyandang disabilitas pada objek-objek wisata yang ada menjadi nilai ukur dalam penyediaan aksesibilitas wisata selanjutnya. Semakin intens penyandang disabilitas mengunjungi objek wisata, maka semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan aksesibilitas yang telah disediakan. Kondisi ini pada akhirnya akan berdampak pada semakin giat pula pengelola maupun Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam mengupayakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tersebut.

Pada kenyataannya, kondisi sebagaimana diharapkan belum berbanding lurus dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Riharnadi (Kepala Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat). Ketika diberikan pertanyaan terkait bagaimana intensitas pemanfaatan aksesibilitas wisata pada objek-objek wisata yang ada di Kota Pangkalpinang dalam wawancara 3 Mei 2019, beliau mengatakan:

“Di beberapa objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata seperti Pantai Pasir Padi, kemudian juga Tamansari, kaum disabilitas ini sangat jarang terlihat, sehingga kami pun sulit menilai bagaimana pemanfaatan dari aksesibilitas yang sudah kami sediakan. Tetapi bagaimana pun juga, sebesar apapun eksistensi mereka di lapangan, ada atau tidak, bagi kami ketersediaan akses bagi kaum disabilitas itu penting. Karena bagaimana pun juga ini sudah menjadi sebuah aturan besar, baik secara internasional maupun nasional. Sebenarnya kalau saja eksistensi penyandang disabilitas itu tinggi pada objek-objek wisata

yang ada, maka penyediaan aksesibilitas wisata yang dilakukan bagi mereka juga akan berbeda.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa keberadaan penyandang disabilitas pada objek-objek wisata yang ada di Kota Pangkalpinang ini cenderung sangat minim. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang sulit untuk menilai bagaimana tingkat pemanfaatan dari aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas tunadaksa yang sudah disediakan. Kendati demikian, penyediaan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas ini akan tetap dilakukan, namun penyediaan aksesibilitas ini tentu akan berbeda apabila penyandang disabilitas tunadaksa sendiri lebih intens dalam memanfaatkan aksesibilitas yang ada.

Lebih lanjut, beberapa orang penyandang disabilitas tunadaksa yang telah diwawancarai sebelumnya memberikan pendapat terkait pemanfaatan aksesibilitas wisata yang telah disediakan. Bapak Abdullah yang berasal dari Desa Mesuk, Kabupaten Bangka Tengah, menyatakan bahwa:

“Dak tau ade ape jak. Dakde sua dapet informasi soal e. Jadi lum pernah dateng ke sane. Nek datang g males, lah jauh-jauh nantik pas nyampe sane dakde akses e, susahlah kite ni, cemane nak masuk e. Jadi di rumah jak lah” (Wawancara 26 April 2019)

(Tidak tau ada aksesibilitas apa saja karena tidak pernah mendapat informasi. Jadi belum pernah datang ke sana. Malas mau ke sana, sudah jauh-jauh nanti tidak ada akses, susah, bagaimana mau masuknya. Jadi di rumah saja)

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa Bapak Abdullah belum tahu mengenai aksesibilitas apa saja yang telah disediakan bagi penyandang

disabilitas tunadaksa pada objek-objek wisata di Kota Pangkalpinang. Oleh karenanya, bapak Abdullah belum pernah mengunjungi dan menggunakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud. Hal ini juga karena tidak adanya informasi mengenai aksesibilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas tunadaksa, sehingga Bapak Abdullah lebih memilih untuk tidak mengunjungi objek wisata yang ada.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ibu Peni dalam wawancara tanggal 29 April 2019 yang merupakan salah seorang tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Pangkalpinang. Beliau juga mengatakan bahwa belum pernah mendapatkan informasi mengenai aksesibilitas yang telah disediakan pada objek-objek wisata yang ada di Kota Pangkalpinang. Oleh karenanya, jarang sekali beliau melihat penyandang disabilitas di sana.

Lebih lanjut, pendapat yang tidak jauh berbeda tidak hanya didapat dari penyandang disabilitas tunadaksa yang berasal dari luar Kota Pangkalpinang. Bapak Mansyur, seorang penyandang disabilitas tunadaksa yang berasal dari Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa:

“Entah ade dak akses e. Informasi e g dak suah dapet. Mane kite ke mall dakde, jalan dakde. Men di luar lah ade lah. Tanggek-tanggek bai, saro men disini. Misal di Pasir Padi ken naek mobil, sude dek kemana-mana lah. Entah men sekarang. Men alun-alun akses masuk e tanggak bai, jadi dak pacak” (Wawancara 03 Mei 2019)

(Tidak tahu ada atau tidak aksesnya. Kalau informasi tidak pernah dapat. Akses ke mall tidak ada, jalan (khusus penyandang) tidak ada. Kalau di luar Kota Pangkalpinang sudah ada. Tangga-tangga semua, susah kalau di sini. Misal di Pantai Pasir Padi naik mobil, tidak kemana-mana. Tidak tahu kalau sekarang. Kalau di alun-alun, akses masuknya tangga semua, jadi tidak bisa)

Bapak Mansyur mengungkapkan bahwa aksesibilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas ini masih sangat minim jumlahnya. Beliau melihat bahwa di beberapa objek wisata yang pernah dikunjungi hanya tersedia tangga saja. Oleh karenanya, bagi pengguna kursi roda, akses ini sangat tidak mendukung. Lebih lanjut, ketika mengunjungi objek wisata Pantai Pasir Padi, beliau hanya duduk-duduk saja dipinggiran pantai, sehingga aksesibilitas yang disediakan belum pernah digunakan. Hal ini dikarenakan letak aksesibilitas yang berseberangan dengan letak pantai.

Informasi lain juga diperoleh peneliti pada saat melakukan wawancara dengan Ibu Fitrianti yang berprofesi sebagai salah satu tenaga pendidik di Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC) Kota Pangkalpinang. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 3 Mei 2019. Melalui wawancara tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwa di Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC) sendiri mempunyai program kegiatan *studi tour* setiap tahunnya. Namun ketika menjalankan kegiatan tersebut, tenaga pendidik di Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC) jarang sekali menggunakan alat bantu kursi roda untuk anak didiknya. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi terkait akses yang telah disediakan bagi penyandang disabilitas tunadaksa. Sehingga anak didik harus didampingi oleh orang tuanya masing-masing pada saat menjalankan kegiatan tersebut dengan cara dipimpin ataupun digendong.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan di atas, diketahui bahwa secara umum penyandang disabilitas

tunadaksa menyatakan bahwa tidak tahu dan tidak pernah menggunakan aksesibilitas yang sudah disediakan bagi mereka pada objek-objek wisata yang ada di Kota Pangkalpinang. Ketidaktahuan ini kemudian menjadikan penyandang disabilitas untuk tidak berani mengambil resiko dan lebih memilih untuk tidak mengunjungi objek wisata yang ada. Oleh karenanya, jarang sekali ditemukan penyandang disabilitas pada objek-objek wisata yang ada di Kota Pangkalpinang.

Informasi kemudian didapat tidak hanya dari penyandang disabilitas saja, melainkan juga dari dua orang masyarakat umum yang berprofesi sebagai tenaga pendidik di sekolah luar biasa yang ada di Kota Pangkalpinang. Keduanya menyampaikan bahwa belum mengetahui terkait aksesibilitas wisata yang telah disediakan bagi penyandang disabilitas tunadaksa pada objek-objek wisata di Kota Pangkalpinang.

Kendati demikian, beberapa orang penyandang disabilitas lainnya menyambut positif keberadaan aksesibilitas tersebut dengan menyatakan bahwa:

“ohh lah ade tu yang sekarang ok, baru tu. Dak salah ku sebelum e lom ade. Lah mantep, bise diakses gampang, yang dorong mudah, dak perlu orang due. Biase ken kalok yang pertama-tama tu ken perlu orang due, kalok ni ken sendirik yang dorong g pacak.” (Bapak Igo dalam wawancara 9 Mei 2019)

(ohh sudah ada itu sekarang. Kalau tidak salah sebelumnya belum ada. Sudah mantap, bisa diakses, mudah, yang bantu mendorong mudah, tidak perlu dua orang. Biasanya kalau yang pertama-tama itu perlu orang dua, kalau sekarang satu orang pun bisa)

Berdasarkan wawancara tersebut Bapak Igo menyatakan bahwa meskipun belum pernah mengakses aksesibilitas yang ada, namun keberadaan aksesibilitas tersebut dirasa akan lebih memudahkan penyandang disabilitas tunadaksa dalam mengakses objek wisata yang ada.

Tidak hanya itu, Bapak Abdul Hakim yang merupakan seorang atlet difabel berpendapat bahwa aksesibilitas yang telah disediakan ini nampaknya sudah bisa digunakan, namun masih membutuhkan *helper*. Bapak Abdul Hakim juga berharap agar para penyandang disabilitas ini bisa menikmati objek wisata tanpa membebankan orang lain. Diberikan kemudahan dalam mengakses sehingga mampu menciptakan kemandirian bagi penyandang disabilitas itu sendiri (Wawancara 9 Mei 2019).

C. Penyandang Disabilitas sebagai Kelompok *Subaltern*

Terdapat dua konsep penting yang tidak bisa diabaikan dalam mengkaji suatu persoalan menggunakan teori *subaltern* dari Gayatri Chakravorty Spivak. Konsep sebagaimana dimaksud ialah hegemoni dan politik etis. Sebagaimana yang telah dikatakan Spivak bahwa kelompok *subaltern* sendiri ialah kelompok minoritas yang suaranya selalu terwakilkan. Oleh karena selalu terwakilkan, maka kelompok *subaltern* ini tidak memiliki akses terhadap kekuasaan hegemoni.

Apabila dilihat dari jumlahnya, penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas dalam kelompok masyarakat secara umum. Jumlah penyandang disabilitas sendiri selalu mengalami perubahan setiap tahunnya.

Perubahan ini disebabkan oleh angka kelahiran cacat, kecelakaan, akibat penyakit, kematian, dan lain sebagainya (Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, 2018). Di Kota Pangkalpinang sendiri, pada tahun 2017 penyandang disabilitas berjumlah 969 jiwa dari total penduduk sebanyak 196.202 jiwa. Namun, pada tahun 2018 penyandang disabilitas hanya berjumlah sebanyak 579 jiwa dari total penduduk sebanyak 204.392 jiwa. Ini berarti ada penurunan jumlah penyandang disabilitas dalam satu tahun terakhir sebanyak 390 jiwa.

Kendati demikian, terkait permasalahan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang wisata khususnya, tetaplah harus dilaksanakan. Hal ini berguna untuk menjamin kemandirian dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam segala bidang kehidupan di masyarakat (Syafi'ie, 2014: 271).

Berkaitan dengan hal tersebut, sejauh ini pengelola bersama pemerintah telah berupaya menyediakan beberapa aksesibilitas fisik dan non-fisik dalam bidang wisata yang ditujukan bagi penyandang disabilitas tunadaksa, meskipun masih sangat minim jumlahnya. Minimnya aksesibilitas ini kemudian tidak diimbangi dengan adanya sosialisasi kepada pengguna (penyandang disabilitas tunadaksa). Oleh karenanya, kebanyakan dari penyandang disabilitas tunadaksa tidak tahu bahwa pemerintah dan pengelola wisata sudah menyediakan aksesibilitas tersebut bagi mereka. Aksesibilitas yang telah disediakan pun pada akhirnya belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Hegemoni dalam penelitian ini dilakukan oleh pemerintah maupun pengelola wisata kepada masyarakat melalui penyediaan aksesibilitas wisata yang dilakukan. Adanya aksesibilitas secara fisik yang disediakan bagi penyandang disabilitas pada objek-objek wisata memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah maupun pengelola wisata peduli terhadap kebutuhan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan perda yang berlaku.

Pada kenyataannya, berdasarkan temuan di lapangan diketahui bahwa aksesibilitas wisata yang telah disediakan tersebut belum pernah digunakan oleh penyandang disabilitas. Beberapa orang penyandang disabilitas tunadaksa lainnya juga berpendapat bahwa untuk dapat menggunakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud masih membutuhkan bantuan orang lain. Ini berarti aksesibilitas yang disediakan juga belum mampu menciptakan kemandirian bagi penyandang disabilitas tunadaksa. Lebih lanjut, kondisi ini juga menjadi bentuk praktik politik etis yang dilakukan pemerintah maupun pengelola wisata dalam penyediaan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas tunadaksa.

Bagi penyandang disabilitas sendiri, untuk dapat melakukan perjalanan wisata secara mandiri haruslah didukung dengan penyediaan aksesibilitas khusus bagi mereka. Namun, hasil temuan di lapangan menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang melakukan perjalanan wisata justru tidak menggunakan aksesibilitas yang ada. Ini dikarenakan penyandang disabilitas tunadaksa tidak tahu mengenai aksesibilitas yang telah disediakan bagi

mereka. Lebih lanjut, terbatasnya kemampuan penyandang disabilitas tunadaksa dalam mengakses objek wisata ini kemudian terwakilkan oleh adanya bantuan dari orang-orang sekitar. Meskipun penyandang disabilitas tidak tahu mengenai aksesibilitas wisata yang sudah disediakan bagi mereka, namun penyandang disabilitas tunadaksa masih bisa mengakses objek-objek wisata dengan bantuan yang diberikan oleh orang tua, guru, dan juga teman sebaya. Secara umum, bantuan yang diberikan berupa gendongan, dipimpin, dan didorong menggunakan kursi roda. Oleh karenanya, selama ada bantuan dari orang-orang sekitar, keberadaan aksesibilitas wisata ini dirasa tidak begitu penting sehingga tidak digunakan.

Lebih lanjut, secara tidak sadar kondisi seperti ini pada akhirnya akan menciptakan ketergantungan dan menghambat penyandang disabilitas dalam mengembangkan dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas tidak hanya bersaing dengan sesama penyandang disabilitas saja, namun juga dengan masyarakat secara umum. Persoalan keterwakilan ini akan memupuk stigma negatif dan budaya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang selalu terwakilkan akan terus dianggap sebagai orang yang tidak mampu dan sakit. Apabila dibiarkan terus-menerus maka persoalan ini akan menjadi persoalan yang rumit dimasa mendatang. Merambah dalam segala aspek kehidupan.

Pada aspek ekonomi misalnya, penyandang disabilitas yang dianggap tidak mampu dan sakit akan sulit mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, penyandang disabilitas hanya akan mendapat pekerjaan “kasar”, seperti

buruh, tukang parkir, kenek mobil, atau bahkan tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran di Kota Pangkalpinang, apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan penduduk setiap tahun (tabel 4.1). Secara sosial, krisis kepercayaan yang di dapat dari orang-orang sekitar ini kemudian akan berujung pada langgengnya status kemiskinan dalam kehidupan penyandang disabilitas itu sendiri.

Dari pemaparan di atas, terlihat jelas bagaimana hegemoni dan praktik politik etis berperan dalam penyediaan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas. Hegemoni dan praktik politik etis ini kemudian menjadikan penyandang disabilitas terwakilkan oleh adanya peran dari orang-orang sekitar. Keterwakilan inilah yang kemudian menjadikan penyandang disabilitas menjadi bagian dari kelompok *subaltern*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyediaan aksesibilitas wisata pada dasarnya harus berbasis pada kebutuhan masyarakat. Bagi penyandang disabilitas sendiri, penyediaan aksesibilitas wisata ini penting dilakukan dalam rangka menciptakan kemandirian. Penelitian mengenai aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas ini dilakukan di lima objek wisata yang ada di Kota Pangkalpinang.

Hasil temuan di lapangan mengungkapkan bahwa aksesibilitas yang disediakan pada objek wisata di Kota Pangkalpinang belum sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan jumlah aksesibilitas wisata yang sudah ada hanya mencapai 31% saja dari total jenis aksesibilitas sesuai dengan perda yang berlaku. Empat dari lima objek wisata yang sudah ditentukan sebelumnya memang sudah menyediakan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas, namun penyediaan aksesibilitas tersebut hanya berupa akses masuk, jalan pedestrian, dan pusat informasi saja.

Minimnya aksesibilitas wisata ini dikarenakan belum adanya aturan ataupun kebijakan secara tertulis ditingkat kabupaten/kota terkait kewajiban penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada objek-objek wisata. Oleh karenanya, hingga saat ini belum ada program kerja dan sejenisnya

dalam bentuk tertulis, yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang maupun pengelola wisata terkait hal tersebut.

Lebih lanjut, minimnya aksesibilitas yang telah disediakan ini belum mampu digunakan penyandang disabilitas tunadaksa. Tidak adanya informasi mengenai hal tersebut dan aksesibilitas yang disediakan dirasa belum diperlukan pada saat mengakses objek wisata, menjadi alasan mendasar mengapa penyandang disabilitas tunadaksa tidak pernah menggunakan aksesibilitas yang telah disediakan.

Kendati demikian, beberapa orang penyandang disabilitas tunadaksa lainnya menyambut baik keberadaan aksesibilitas tersebut. Penyandang disabilitas tunadaksa menyampaikan bahwa keberadaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud, akan mempermudah mereka dalam mengakses objek wisata, meskipun masih membutuhkan bantuan orang lain. Pernyataan ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa aksesibilitas yang telah ada juga belum mampu menciptakan kemandirian bagi penyandang disabilitas tunadaksa.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan peneliti kepada pihak pemerintah, pengelola wisata, dan kepada pembaca terkait penyediaan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas.

1. Pemerintah maupun pengelola wisata mempunyai kapasitas untuk membuat dan mengontrol setiap inisiatif baik yang dilakukan, contohnya dalam penyediaan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas ini. Oleh karena itu, langkah lebih baiknya apabila hal-hal baik yang dibuat tersebut bersifat berkelanjutan. Baik itu dalam hal pengembangan, perawatan, maupun evaluasi. Hal ini penting dilakukan agar tercapainya tujuan dari penyediaan aksesibilitas wisata tersebut.
2. Peneliti berharap kepada pembaca untuk lebih peka dan dapat memberikan kepercayaan serta kesempatan bagi penyandang disabilitas agar dapat mengeksplor kemampuan dirinya sendiri. Saran ini memiliki tujuan akhir agar terciptanya kemandirian pada penyandang disabilitas. Lebih lanjut, saran ini diharapkan mampu mengurangi pandangan negatif masyarakat kepada penyandang disabilitas yang selama ini menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa.